



Jurnal Ilmiah **AKRAWALA** Hasil Pemikiran dan Penelitian

Volume 5 | No.2 | September 2014

ISSN : 2086-8111

KAPITALISME DI INDONESIA : DI PERSIMPANGAN JALAN

Oleh : Pipin Hanapiah

**IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965**

Oleh : Agus Budiman

PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Kiki Endah

***FRANCHISE* : MODEL KEMITRAAN USAHA BESAR
DENGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)**

Oleh : Angga Gumilar

JURNAL ILMIAH CAKRAWALA

Vol.5

No.2

Hal
63 - 157

Ciamis
September 2014

ISSN 2086-8111

LPPM Universitas Galuh

Jl. Arya Janggala No.11 Tlp (0265) 775295 Ciamis

Email : lppm@unigal.ac.id

C Jurnal Ilmiah
AKRAWALA
Hasil Pemikiran dan Penelitian

VOLUME 5 NOMOR 2 September 2014

ISSN : 2086-8111

Pelindung

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis

Dr. H. Yat Pospia Brata, Drs., M.Si.

(Rektor Universitas Galuh)

Dewan Pengarah

Endang Supriatna, S.H., M.Si.

(Wakil Rektor I)

H. Budi Setia, Ir., M.M.

(Wakil Rektor II)

Dedi Herdiansyah, Ir., M.P.

(Wakil Rektor III)

Penanggung Jawab

H. Awang Kusliawan, Drs., M.M.

Pimpinan Redaksi

Endin Lidinillah, S.Ag., M.Ag.

Wakil Pimpinan Redaksi

Maman Herman, S.Pd., M.Pd.

Redaktur Ahli

Dr. Enas., M.M.

Dr. H. Toto, M.Pd.

Editor

Tito Hardiyanto, S.P., M.P.

Hendi Budiman, S.H., M.H.

Teti Gumiaty, Dra., M.Pd.

Tata Letak

Agung Prawiranagara, S.P.

Adi Dwi Rianto, S.Pd.

Tata Usaha

R. Gardea

Elom Carlam Sujana

Alamat Redaksi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jl. Arya Janggala No.11 Tlp. (0265) 775295 Ciamis

Email: lppmunigali@gmail.com

Terbit pertama Juni 2010

PENGANTAR REDAKSI

Menulis merupakan hal yang sangat penting bagi guru dan dosen. Bagi guru, lahirnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menjadi bukti nyata bahwa menulis merupakan hal yang sangat penting. Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah bahwa setiap guru wajib membuat karya tulis ilmiah (KTI) sebagai syarat meningkatkan jenjang kariernya. Bagi dosen, menulis merupakan beban kerja yang senantiasa harus dikerjakan. Selain pembelajaran, dosen memiliki dua kewajiban lainnya, sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen hanya diakui bila telah menjadi laporan penelitian atau pengabdian yang dipublikasikan dalam media publikasi yang telah ditentukan.

Pemaparan di atas menunjukkan begitu pentingnya kegiatan menulis bagi guru dan dosen. Oleh karena itu, Jurnal Ilmiah Cakrawala Volume 5 Nomor 2, September 2014 kali ini memuat hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, dan ide-ide (gagasan) original dari guru dan dosen. Sebagai kalangan akademisi, melalui tulisan di dalam jurnal, guru dan dosen diharapkan mampu mengembangkan kompetensinya dan menjadi inovator di bidangnya.

Jurnal Ilmiah Cakrawala senantiasa mengangkat berbagai masalah dari berbagai kajian ilmu yang diteliti secara ilmiah dengan harapan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis bagi pembacanya.

Ciamis, September 2014

Pimpinan Redaksi

DAFTAR ISI
Jurnal Ilmiah Cakrawala
Volume 5 | Nomor 2 | September 2014

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERGUB NOMOR 58 TAHUN 2010
TENTANG PROGRAM DESA MANDIRI DALAM PERWUJUDAN DESA PERADABAN
DI JAWA BARAT (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis)

Oleh : Dini Yuliani – 63

KAPITALISME DI INDONESIA: DI PERSIMPANGAN JALAN

Oleh : Pipin Hanapiah – 73

PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Kiki Endah – 81

FRANCHISE: MODEL KEMITRAAN USAHA BESAR
DENGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Oleh : Angga Gumilar – 89

BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH (BUMN/D)
ANTARA ORIENTASI KEUNTUNGAN DAN TUJUAN SOSIAL

Oleh: R. Didi Djadjuli – 95

UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN IPS TENTANG LETAK ASTRONOMIS
SUATU WILAYAH DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA PETA
SISWA KELAS VI SD NEGERI 3 MULYASARI

Oleh : Apan Ependi – 105

UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MATERI POKOK MEMBACA QS. AL-KAUTSAR
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV
SDN 3 SUKANAGARA KECAMATAN PENJALU KABUPATEN CIAMIS

Oleh : O'ing – 113

UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN SISWA DALAM BERBICARA BAHASA INGGRIS
MELALUI MEDIA BELAJAR BAHASA BERBANTU KOMPUTER PADA SISWA KELAS IX-D
SMP NEGERI 2 CIKONENG - CIAMIS TAHUN AJARAN 2013/2014

Oleh : Yuliana – 121

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MATERI MENDESKRIPSIKAN PERUBAHAN WUJUD BENDA MATA PELAJARAN IPA
MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN SISWA KELAS IV SDN 2 TANJUNGPAYA

Oleh : Mimi – 131

UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA INDONESIA
MELALUI PENERAPAN PENGAJARAN MODEL *CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING*
PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 1 KARANGSARI
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh : Tati Heryana – 137

PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Oleh : Hendi Budiaman – 143

IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965

Oleh : Agus Budiman – 149

IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965

Oleh

Agus Budiman

Dosen Tetap YPG di Program Studi Pendidikan Sejarah

FKIP Universitas Galuh Ciamis

abuyagus.budiman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan pemerintahan, penerapan Politik Bebas Aktif, Sejauhmana penyimpangan-penyimpangan praktek politik luar negeri bebas aktif pada masa Demokrasi terpimpin. Penelitian ini menggunakan metode historis, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: Akibat gagalnya konstituante untuk membentuk Undang-undang Dasar yang baru, Serta rentetan peristiwa politik lainnya, maka sampailah pada inti klimaks pada bulan Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959, isinya mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Sedangkan demokrasi yang dianut adalah "Demokrasi Terpimpin" dengan mengambil terminologi Sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sedang terpimpin menurut Presiden Sukarno dengan pimpinan pribadinya selaku Pemimpin Besar Revolusi yang cenderung ke arah otoriter. Sistem politik terpimpin juga mengarah kepada ekonomi terpimpin yang melahirkan sistem "etatisme". Sistem ekonomi terpusat menempatkan pemerintah pada pemilik lisensi berbagai kebijakan ekonomi. Ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang memberikan peluang ke arah terciptanya penyelewengan dan korupsi.

Kata Kunci: politik luar negeri, demokrasi terpimpin

Abstract

This study aims to determine the system and the implementation of the government, the application of Political Free Active, extent deviations practice independent and active foreign policy during the Guided Democracy. This study uses historical method, to obtain the necessary data, the authors use data collection techniques through the study of literature. Results illustrate that: As a result of the failure of a constituent to form a Constitution that is new, And a series of other political events, then comes the core climax in July 1959 with a presidential decree issued July 5, 1959, the contents of the dissolution of the constituent assembly and re-enactment of the 1945 Constitution. while embraced democracy is "Guided Democracy" by taking fourth Pancasila Sila terminology that is guided by the wisdom of deliberation/representation, being guided by the leadership of President Sukarno with his personal as leader of the Revolution who tend toward authoritarian. The political system also leads to economic guided system that spawned "etatisme". Centralized economic system puts the government on economic policies licensors. This gives rise to the high cost economy that provides opportunities toward the creation of fraud and corruption.

Keywords: foreign policy, guided democracy

PENDAHULUAN

Tahun 1955 diselenggarakanlah Pemilihan Umum yang pertama, yaitu untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante, tetapi pemilihan umum itu ternyata tidak bisa membawa perbaikan dalam kehidupan politik.

Kestabilan pemerintah tidak dapat tercapai karena DPR hasil pemilu, seperti juga DPRS terpecah-pecah dalam banyak partai yang akibatnya setiap kabinet tergantung pada dukungan partai yang turut Serta dalam koalisi. Keadaan ini

merupakan suatu bukti bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di negara kita, karena tidak membawa rakyat ke dalam kehidupan yang lebih berbahagia untuk menikmati hasil kemerdekaan.

Dalam sistem demokrasi liberal, kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai-partai politik yang memerintah berdasarkan atas perbandingan kekuatan dalam parlemen. Sehingga sering terjadi pergantian kabinet, karena adanya tekanan-tekanan dari kekuatan politik dari partai politik yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

kabinet yang pernah berkuasa di Indonesia dan jatuh sebelum waktunya berak-hir. Kenyataan itu mengakibatkan setiap upaya pembangunan nasional sulit untuk dilaksanakan (Ariwiasi, 1971: 115). Keinginan untuk melak-sanakan demokrasi terpimpin untuk pertama kalinya resmi dicetuskan pada waktu Presiden Sukarno sedang mengadakan pidato pelantikan anggota-anggota konstituante hasil pemilihan umum 1955 di Bandung, pada tanggal 10 November 1956. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikutip bagian-bagian dari pidato Presiden Soekarno yang menggambarkan pengertian dan maksud dari istilah itu :

“...bahwa demokrasi untuk sementara haruslah demokrasi yang menjaga jangan ada yang eksploitasi oleh golongan terhadap golongan yang lain. Ini berarti bahwa demokrasi kita untuk sementara haruslah demokrasi terbimbing, demokrasi terpimpin, *geleide democratie* yang tidak berdiri di atas paham-paham liberalisme” (Usep Ranawijaya, 1983 : 56).

Cetusan ini oleh Presiden Sukarno di-realisasikan dalam sebuah konsep yang berisi gagasan-gagasan untuk memperbaiki keasaan pemerintah akibat suasana politik dalam negeri yang makin memburuk dengan meluasnya pemberontakan di daerah, dan tidak dapat tercapainya pemerintah yang stabil meskipun telah dilakukan pemilihan umum (Sekretariat Negara RI, 1985: 344).

Demikian halnya politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin seolah-olah terlalu menarik garis ke kiri. Hal ini tercermin dengan diberlakukannya politik “*Nefos-Old-efos*”. Pengertian *Nefos* dan *Oldefos* dapat diartikan sebagai politik luar negeri yang anti Liberaisisme (anti Barat).

Sesungguhnya dalam UUD 1945, sudah tersurat dan tersirat arah/pedoman bagi politik luar negeri Indonesia, namun dalam pelaksana-annya pada masa Demokrasi Terpimpin ter-dapat aturan-aturan lain yang kemudian mem-beri arah baru terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Hal inilah yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai pe-nyimpangan-penyimpangan politik luar negeri bebas aktif pada masa Demokrasi terpimpin.

Berangkat dari uraian di atas penulis mencoba menguak yang berkaitan dengan politik luar negeri RI. Studi sejarah ini tersusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Implementasi Politik

Luar Negeri Bebas Aktif Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis, karena penulisan ini penela-ahannya dengan kenyataan-kenyataan yang ber-langsung pada masa lampau.

Untuk memperoleh data-data yang diper-lukan, penulis menggunakan teknik penguin-pulan data melalui Studi kepustakaan atau *book survey* antara lain dengan jalan menelaah buku-buku, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Perjuangan Mengendalikan Irian Barat

Menurut persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) status Irian Barat akan dibicara-kan setahun setelah pengakuan. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun Belanda tidak bersedia berunding tentang masalah Irian Barat. Bahkan Belanda telah mempersiapkan berdirinya “Ne-gara Papua”. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Indonesia selain merebut kembali Irian Barat dengan berbagai Cara.

Dengan usaha memperjuangkan pengem-balian wilayah Irian Barat dari kekuasaan Kerajaan Belanda, maka bangsa Indonesia me-lakukan dua cara perjuangan yaitu perjuangan diplomasi dan politik, serta perjuangan bersen-jata, guna menembus kemacetan-kemacetan Keresidenan New Guenia atau Irian Barat.

Setelah bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke dalam bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Bangsa Indonesia kembali kepada tuntutan-nya semula, sesuai dengan persetujuan KMB, me-ngenai status Irian Barat. Pemerintah kemudian mengirim delegasi Menteri Luar Negeri. Mr. Muchammad Roem Negeri Belanda guna me-ngadakan perundingan pada tanggal 4 Desember 1950. Pihak Indonesia mencoba me-nyampaikan usul-usul baru penyelesaian Irian Barat, yang terdiri dari tujuh pasal, salah satu-nya adalah sebagai berikut:

“Dalam lingkungan kerja sama antara Indonesia dan Nederland di lapangan eko-nomi pemerintah Indonesia mengakui hak dan konsesi

yang sekarang ada dan di-beri perhatian yang istimewa kepada Nederland mengenai pemberian konsesi baru dan pe-nempatan kapital. Selanjutnya di dalam me-ngembangkan sumber-sumber di Irian Barat akan diberi perhatian khusus kepada kepen-tingan-kepentingan Belanda di sana. Antara lain dalam mengusahakan dan mengolah ke-kayaan tanah. Pada umumnya pemerintah Indonesia bersedia memajukan Irian Barat di lapangan ekonomi, memperhatikan dengan sepenuhnya kepentingan Belanda di lapa-ngan perdagangan perkapalan dan industri". (Sejarah Militer KODAM XVII/Cendra-wasih, 1971: 43)

Usul-usul tersebut tidak diterima pemerin-tah Kerajaan Belanda, dengan menyampaikan usul balasan sebagai berikut:

"Supaya Irian Barat ditempatkan di bawah pemerintahan Uni Indonesia-Belanda de-ngan syarat Belanda tetap akan menjalan-kan pemerintahan dan untuk menyelesai-kan masalah Irian Barat supaya dibentuk satu komisi jasa-jasa Baik". (Disbintal TNI-AD, 1990: 7-8).

Pihak Republik Indonesia juga tidak dapat menerima usul balasan pihak pemerintah Kera-jaan Belanda tersebut, karena di sana nampak jelas niat Belanda untuk tetap menguasai wila-yah Irian Barat dan tidak mau menyerahkannya pada pihak Republik Indonesia. Adapun dalam usul-usul balasan pada perundingan-peru-ndingan lanjutan dari pemerintah Kerajaan Belanda; terhadap pemerintahan Republik Indonesia yaitu bahwa "Status akhir dari wi-layah Irian Barat akan diserahkan kepada pen-duduk Irian asli guna menentukan nasibnya sendiri atau hak Zelfbeschikking Recht (Markas Besar TNI-AD" 1985 : 240).

Dalam menghadapi sikap dan usaha-usaha pemerintah kerajaan Belanda yang ingin tetap menguasai Wilayah Irian Barat sehingga sudah tidak mau lagi menerima usul-usul pihak Re-publik Indonesia dalam berbagai perundingan bilateral dengan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah tersebut, bangsa Indonesia pun akhirnya menunjukkan sikap dan usaha-usahnya sendiri. Sikap dan usaha-usaha yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu mula-mula memasukan masalah Irian Barat ke dalam acara Sidang Majelis Umum LPBB, akan tetapi, usaha ini gagal bah-kan sampai tahun 1957, yaitu ketika diadakan resolusi Perserikatan

Bangsa-Bangsa mengenai Irian Barat, Indonesia belum juga berhasil mencapai cita-citanya.

"Dalam resolusi Irian Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangsa Indonesia men-dapat 41 suara mendukung 29 menolak dan 11 abstein. Walaupun Indonesia telah men-dapat dukungan yang banyak tersebut, na-mun belum berhasil memenangkannya ka-rena tidak mencapai 2/3 mayoritas suara" (Alfatic, 1988: 750).

Amerika Serikat dalam resolusi PBB ini abstein. Sikap Amerika Serikat ini secara poli-tik banyak menguntungkan pihak Belanda.

Gagalnya resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut karena "Negara-negara Barat masih teguh mendukung posisi Belanda, bah-kan sikap tersebut bertambah kuat lagi dengan adanya perang dingin antara Blok Barat yang berhadapan dengan Blok Timur" (poespone-goro, 1984: 332).

Kegagalan-kegagalan yang didapatkan di Perserikatan Bangsa-bangsa ini, membuat pihak Indonesia tidak lagi memasukan masalah Irian Barat ke dalam Sidang Majelis Umum PBB. Adapun alasannya karena pihak Belanda yang tidak berubah dan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kolonial.

Akan tetapi, bangsa Indonesia bukannya menghentikan perjuangan pengembalian Irian Barat, bahkan mulai menggunakan Cara lain yaitu dengan mengambil alih perusahaan-per-usahaan dan modal milik Belanda di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meneka? Pihak Belanda dari segi politik maupun ekonomi.

Sebagai puncak perjuangan di bidang dip-lomasi dan politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia; dalam memperjuangkan Wilayah Irian Barat, yaitu dengan jalan pemutusan hu-bungan diplomatiknya dengan Pemerintah Ke-rajaan Belanda. Pemutusan hubungan diploma-tik tersebut langsung diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Pada pidato memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke-15 pada tanggal 17 Agustus 1960.

Perjuangan diplomasi di forum Perserika-tan Bangsa-Bangsa kembali didengungkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melalui pidato Presiden RI, Ir. Soekarno pada tanggal 30 Desember 1960, dengan judul "Membangun Dunia Kembali", di mana dalam isi pidato tersebut tersirat sikap tegas Bangsa Indonesia yang mengandung ancaman yang sudah tidak bisa

ditawar lagi dalam perjuangannya. Bangsa Indonesia akan melakukan perang terbuka dengan Belanda dalam merebut Wilayah Irian Barat.

Dengan gagalnya perundingan-perundingan yang dilakukan antara pihak pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Pemerintah Kerajaan Belanda di Forum PBB, memberikan penilaian tersendiri bagi Bangsa Indonesia bahwa pihak Belanda jelas tidak akan menyerahkan Wilayah Irian Barat begitu saja terhadap Pihak Indonesia, sehingga pemerintah RI berpendapat bahwa masalah kembalinya Irian Barat harus dilakukan dengan Cara kekuatan militer.

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TriKora) di Yogyakarta.

Isinya sebagai berikut:

1. Gagalakan pembentukan Negara Boneka Irian Barat Papua buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa (Sartono Kartodirdjo, 1957: 111).

Kemudian dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sebagai Panglima Mandala ditunjuklah Mayor Jendral Soeharto-Komando Mandala bermarkas besar di Makasar (Ujungpandang). Dari Komando Mandala inilah dilancarkan operasi-operasi militer. Antara lain yang terkenal ialah "Operasi Jayawijaya". Dengan Operasi Jayawijaya ini dikerahkan militer besar-besaran dari kesatuan-kesatuan Angkatan Darat, angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian (Brimob), dan Sukarelawan. Mereka siap dengan bersenjata lengkap, termasuk 120 buah kapal perang dan 32 pesawat pengebom (Pusat Sejarah ABRI, 1978; 30). V

Salah satu pertempuran untuk merebut Irian Barat terjadi di Laut Aru. Dalam pertempuran itu kapal RI "Motor Torpedo Boat Macan Tutul" (MTB Macan Tutul) tenggelam, Komodor Yos Sudarso, Kapten Laut Wiranto, dan beberapa orang awak kapal itu tenggelam. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa (Pusat Sejarah ABRI, 1978: 32).

Sementara itu, pasukan-pasukan TNI dan sukarelawan mulai didaratkan di Irian Barat. Pendaratan itu dilakukan oleh pasukan-pasukan penerjun

Persiapan Indonesia yang cukup matang dan pendaratan pasukan TNI di Irian Barat diketahui oleh Dunia Internasional. Beberapa negara merasa khawatir bila terjadi perang besar antara Indonesia dan Belanda. Kemudian seorang diplomat Amerika Serikat bernama Elsworth Bunker mengusulkan suatu rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Rencana tersebut kemudian dikenal dengan nama Rencana Bunker.

Adapun pokok-pokok isinya sebagai berikut:

1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan melalui suatu Badan Pemerintah PBB atau United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
2. Akan diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat secara pemilihan (*act of free choice*) (Sartono Kartodirdjo, 1957: 113).

Rencana Bunker itu dapat diterima oleh kedua belah pihak maka atas dasar Rencana Bunker itu, pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani Perseetujuan New York.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1962, Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada Badan Pemerintahan PEB (UNTEA). Dan pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia

2. Indonesia Keluar dari PEB

Dalam periode ini Indonesia juga menentang pembentukan Negara Malaysia oleh Inggris, dengan adanya pengaruh PKI Presiden Soekarno beranggapan bahwa Malaysia adalah proyek neokolonialis Inggris yang dipandang membahayakan revolusi Indonesia. Karena itu maka berdirinya negara Malaysia harus dicegah apabila tetap dipaksakan berdiri harus dihindarkan.

Usaha Pemerintah Indonesia untuk meningsafkan Malaysia dan menyelesaikan segala persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan tidak berhasil karena dihalang-halangi Inggris maka pada tanggal 3 Mei 1946 Presiden Indonesia mengeluarkan komando yang disebut Dwikora isinya:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabang, Serawak, Brunai untuk memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia (Kansil CST, 1982: 83).

Para sukarelawan Indonesia berusaha masuk ke Wilayah daerah Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara dan di sana melancarkan operasi-operasi terhadap angkatan perang persemakmuran Inggris.

Atas prakarsa Filipina maka penyelesaian sengketa dengan Malaysia, pada tanggal 9-17 April 1963 diselenggarakan konferensi tingkat wakil-wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) dari Indonesia, Malaysia, Filipina. Pertemuan itu membahas tentang rencana pembentukan Federasi Malaysia dan membentuk konfederasi antar tiga negara dalam rangka melaksanakan kerja sama, pertemuan ini juga membahas rencana persiapan konferensi tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan pada bulan Juni 1963.

Dengan adanya pertemuan Tokyo antara presiden Indonesia Soekarno dengan Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman yang diselenggarakan 1 Juli 1963, dapat mengurangi terlaksananya ketegangan dan memudahkan jalan bagi terlaksananya konferensi puncak antara tiga negara di Manila. Pada tanggal 7-11 Juni 1963 Menteri tiga negara mengadakan pertemuan dan menghasilkan suatu pengertian tentang permasalahan yang timbul akibat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia, suasana yang baik ini akhirnya rusak karena Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman tanggal 9 Juni 1963 menandatangani dokumen mengenai pembentukan negara Federasi Malaysia. Maka dengan demikian segala rencana yang telah dirintis bersama tentang Federasi Malaysia terbentuk, namun Indonesia menganggap kejadian itu telah menyimpang dari mufakat semula, meskipun demikian pertemuan puncak antara ketiga kepala negara/kepala pemerintahan, tetap diselenggarakan dari tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 di Manila, Pertemuan tersebut menghasilkan tiga Dokumen, Deklarasi Manila, Persetujuan Manila dan Komunike bersama (Sartono Kartodirdjo, 1975: 116).

Pembentukan Federasi Malaysia ketiga kepala negara/kepala pemerintahan mufakat untuk melibatkan Sekretaris Jenderal PBB untuk menyelidiki keinginan-keinginan rakyat di daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia, Indonesia dan Filipina menyambut gembira pembentukan Federasi Malaysia. Pada mulanya Federasi Malaysia akan dibentuk tanggal 31 Agustus 1963 di London, tapi kemudian ditangguhkan sampai tanggal 16 September 1963,

meskipun misi PEB belum melaporkan hasil penyelidikan mengenai keinginan rakyat daerah-daerah itu, namun pembentukan Federasi Malaysia tetap dilaksanakan. Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa tindakan itu dianggap suatu pelanggaran terhadap kesepakatan bersama antara tiga negara (Sartono Kartodirdjo, 1975: 117).

Pada sidang Umum PBB tahun 1960 Presiden Soekarno hadir mengucapkan suatu pidato dengan judul "Membangun Dunia Kembali" isi pidato tersebut menyebutkan antara lain "Kemungkinan retooling PBB" (Sartono Kartodirdjo, 1975: 118).

Ternyata saran Presiden Soekarno tidak mendapat sambutan serius dari PBB. Sehubungan dengan diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Presiden Soekarno mengulangi kembali pidatonya "Membangun Dunia Kembali" PBB merupakan pencerminan dunia tahun 1945 pada waktu belum banyak terdapat negara-negara di Asia. Hubungan komposisi dunia sudah kembali, tetapi PBB tidak berubah, tetap seperti PBB tahun 1945 karena itulah PBB perlu dirombak oleh karena jikalau PBB sekarang tetap menerima Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, maka kita Indonesia akan keluar. Kita meninggalkan PBB sekarang.

Jadi jelaslah isi pidato Presiden Soekarno telah mengakibatkan diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan alasan itulah Indonesia keluar dari PBB. Perwakilan Republik Indonesia di PBB menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal PBB isi pidato Presiden Soekarno tersebut dengan tujuan agar para anggota PBB tidak menyokong diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sebaliknya memilih Indonesia tetap tinggal menjadi anggota PBB.

Inilah rupanya taktik terakhir Presiden Soekarno di forum PBB untuk mengucilkan Malaysia, ternyata hasilnya malah sebaliknya Indonesia keluar dari PBB dan menjadi terkucil.

3. Konfrontasi Dengan Malaysia

Ketegangan memuncak, terjadilah demonstrasi di Kuala Lumpur terhadap Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan sebaliknya kantor Kedutaan Malaysia dan Kantor Kedutaan Inggris di Jakarta. Maka pada tanggal 17 September 1963 akhirnya pecahlah permusuhan antara Republik Indonesia dengan Malaysia

setelah diucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

Pada tanggal 3 September 1964 Pemerintah Malaysia meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pengaduan atas agresi Indonesia terhadap Malaysia berupa invasi udara oleh pasukan payung Indonesia di Malaysia bagian Selatan. Dewan Keamanan menyetujui permintaan Malaysia akhirnya masalah itu diperdebatkan dalam sidang Dewan Keamanan.

Perkembangan politik Dwikora ini tidak terlepas dari posisi kedudukan terkemuka PKI dalam hubungannya dengan Demokrasi Terpimpin, sehingga akhirnya membelokan politik luar negeri Indonesia keluar dari garis politik luar negeri RRC yang dikenal dengan nama hubungan Poros Jakarta Peking. Dipandang dari kaca mata RRC, konfrontasi dengan Malaysia sangat menguntungkan, karena mampu menyedot potensi negara-negara yang dianggap musuh oleh RRC. Tapi dilihat dari sudut kepentingan Indonesia bermaksud memainkan perannya di Asia Tenggara konfrontasi justru sebaliknya sangat merugikan kepentingan Indonesia sebab kejadian ini menyedot simpati jutaan orang Malaysia, ditinjau dari segi militer, konfrontasi Dwikora bukan merupakan sukses, berlainan dengan operasi-operasi pembebasan Irian Barat.

Nampaknya bukan tidak ada keinginan dari keduanya untuk melakukan perdamaian, tetapi bagaimana perdamaian tersebut bisa menyelamatkan muka kedua pemerintahan. Indonesia yang merasa lebih kuat dan yang lebih dirugikan menganggap Cara militer adalah alternatif terakhir walaupun ada Inggris di belakang Malaysia.

Kenyataan menunjukkan sikap arogansi dari kedua belah pihak telah banyak membawa korban yang tidak sedikit antara kedua negara tersebut. Serta kesulitan ekonomi akan tetapi setelah konfrontasi berjalan lebih dari tiga tahun lamanya, kedua bangsa yang bertetangga dan berasal dari satu rumpun bangsa Melayu menginsafi dan menyadari bahwa konfrontasi secara fisik melemahkan negara masing-masing bahkan mengancam perdamaian di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Hasrat Indonesia untuk mengakhiri konfrontasi ke arah tercapainya perdamaian menjadi lebih besar ketika tiba saatnya, generasi baru angkatan 66 yang antara lain menuntut dihentikannya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.

Akhirnya Secara diam-diam pada tanggal 17 Mei 1966 pemerintah Indonesia telah mengirim suatu misi ABRI ke Kuala Lumpur dipimpin Laksamana Muda (Laut) O.B. Syaaf yang kemudian disusul pengiriman sebuah delegasi di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri ke Bangkok 29 Mei 1966 (Kansil CST, 1982: 84).

Perundingan untuk mencapai perdamaian antara kedua negara dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dengan delegasi Malaysia yang dipimpin Tun Abdul Razak, secara resmi diadakan 30 Mei 1966, dan tepat pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1966 diadakan upacara tukar menukar nota surat perundingan, kemudian dalam bulan Juni dan Juli 1966, kontrak antara kedua negara tetap dilangsungkan guna merampungkan segala sesuatu karena persiapan penandatanganan persetujuan Bangkok tanggal 11 Agustus 1966 di tandai dengan persetujuan Bangkok. Dengan ditandainya persetujuan Bangkok maka berakhirilah Konfrontasi dengan Malaysia selama tiga tahun.

4. Akibat-akibat Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Politik Luar Negeri yang dijalankan pada saat itu, dalam beberapa hal bersifat konfrontatif. Oleh karenanya jaman itu diplomasi yang dijalkannya bersifat diplomasi revolusioner dan diplomasi konfrontatif, yang mau merombak dan menyusun suatu suasana dan perimbangan baru antara negara-negara. Bahkan nampak Indonesia pada waktu itu terlalu berlebihan, sikap diplomasinya yang makin nampak anti barat dengan masalah Irian Barat yang dipakai sebagai landasan, bahkan dalam upaya menghadapi kekuatan barat tersebut Presiden Soekarno berusaha menggalang persatuan di kalangan negara-negara Asia Afrika dengan melontarkan politik NEFOS (*New Emerging Forces*) dan OLDEFOS (*Old Established Forces*).

Inti dari gagasan Presiden Soekarno tersebut adalah bahwa dunia ini terbagi atas kekuatan-kekuatan anti imperialisme dan kolonialisme yang diistilahkan dengan NEFOS di satu pihak dan kekuatan-kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang diistilahkan dengan sebutan OLDEFOS di pihak lain. NEFOS dilukiskan sebagai kekuatan yang terdiri atas; bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin negara-negara sosialis Serta kelompok-kelompok Progresif di negara-negara kapitalis. Sedangkan OLDEFOS

dilukiskan sebagai kekuatan yang terdiri atas negara-negara kapitalis Barat (Soedjati Djiwandono, 1985: 650).

Ide politik NEFOS dan OLDEFOS diperkenalkan kepada dunia pertama-tama adalah pada KTT Non-Blok di Bagdad tahun 1961, yang merupakan realisasi dari isi pidato “Mem-bangun Dunia Kembali”. Gagasan itu ternyata kurang mendapat perhatian seperti yang diha-rapkan. Malahan politik tersebut mengakibat-kan timbulnya kerenggangan antara Indonesia dengan negara-negara pendiri gerakan Non Blok, seperti India dan Mesir. Kerenggangan tersebut makin tampak ketika berupaya mem-bujuk anggota Non-Blok untuk membentuk PBB tandingan yang diberi nama *Conference Of The New Emergencing* (CONEFO), hal ini merupakan reaksi Indonesia atas diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB, sedangkan pa-da saat itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malayasia (Suli Sulaiman, 1976 : 13).

Ajakan Indonesia itu sertamerta ditolak oleh kebanyakan negara-negara Non-Blok. Ka-rena langkah yang diambil Indonesia ini diang-gap menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan da-lam jiwa gerakan Non-Blok. Padahal Indonesia sendiri adalah termasuk salah satu arsitek gera-kan tersebut.

Setelah gagal membujuk negara-negara Non-Blok Indonesia kemudian berpaling kepa-da Cina (RRC) yang selama demokrasi ter-pimpin merupakan “Mitra Politik” Indonesia yang sering mendukung langkah politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama. Seperti yang sudah diduga kali ini pun RRC mendu-kung penuh upaya Indonesia itu. Keterlibatan RRC ini banyak mengundang reaksi dari ne-gara-negara anggota Non-Blok terutama dari India yang pada waktu itu masih dalam suasana konflik dengan RRC. Kerja sama Indonesia de-ngan RRC ini kemudian melahirkan apa yang disebut “Poros Jakarta-Peking”. Timbulnya pembentukan politik poros-porosan dinyatakan sendiri oleh Presiden Soekarno sebagai berikut:

“Karuan saja rentetan-rentetan revolusi di Asia itu menggoncangkan seluruh dunia. Oleh sebab itu kalau kita sekarang membina suatu proses anti imperialisme, poros anti kolonialisme, yaitu poros Jakarta, Phnom-penh, Hanoi, Peking dan Pyongyang jangan-lah dikira bahwa poros ini adalah bikin-

bikinan, tidak poros ini yang paling wajar yang dibentuk oleh jalannya sejarah sendiri” (M. Sabir, 1987: 194).

Hubungan dan Diplomasia yang dilaksana-kan politik luar negeri Indonesia itu, pada masa demokrasi terpimpin seolah terikat akan keha-rusan tercapainya revolusi sebagaimana digem-bar-gemborkan Soekarno, sehingga sebagai Ca-ra selalu ditempuhnya, walaupun semuanya aki-bat negatif bagi pergaulan Indonesia di dunia Internasional. Seperti ditegaskan dalam mani-pol bahwa Cara yang harus dilakukan tidak lain harus “Tidak Mengenal Kompromi” harus “Ra-dikal” dan revolusioner. Cara itu tidak bisa di-golongkan sebagai suatu Cara hanya bertujuan untuk menjalankan ofensif diplomatik saja, ka-rena dalam kenyataan telah menunjukkan sifat-sifat yang radikal, yang menjurus kepada hos-tile attitude terhadap hampir setiap permasala-han, sebagai konsekuensinya maka posisi Indonesia lambat laun semakin terasing (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984: 342).

Konsep pembangunan dunia kembali yang diciptakan Soekarno di depan forum PBB itu merupakan salah satu upaya agar Indonesia di-pandang sebagai unsur yang diperhitungkan di Asia. Pada kesempatan tersebut seolah-olah Indonesia menjual konsep-konsepnya untuk pe-mecahan masalah Internasional dewasa ini. Po-sisi kepeloporan (Mercusuar) Indonesia hendak ditingkatkan. Sedangkan dalam masalah ekono-mi dalam negeri sendiri Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Mampu atau tidaknya Indonesia mengatasi kesulitan dalam negeri itu-lah yang menentukan apakah suatu Indonesia diperhatikan oleh dunia luar atau tidak, selain manuver politik PKI di dalam negeri tampak-nya mampu mempengaruhi jalannya politik luar negeri dan kondisi Indonesia.

Secara jujur harus diakui bahwa, kalau kita berpedoman pada falsafah Pancasila, maka yang namanya Partai Komunis Indonesia itu bertentangan sekali. Namun dengan segala ke-lihaiannya PKI mampu bertahan bahkan bertin-dak ofensif dalam berbagai segi kehidupan ber-negara. Bahkan dalam bidang ideologi PKI ti-dak tanggung-tanggung mereka berusaha meng-ganti sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan rumusan “Kemerdekaan Beragama” seperti yang dikemukakan oleh Njoto dalam sidang-sidang Konstituante dalam tahun 1958 (Nugroho Notosusanto, 1985: 1).

Secara terbuka kita harus mengakui bahwa menjelang penerapan sistem Demokrasi Terpimpin, banyak memberi peluang kepada PKI untuk memperbesar kekuatan partainya baik dalam masyarakat luas maupun dalam tubuh pemerintahan. Pada saat itu negara dalam keadaan bergolak dan mengancam keamanan negara dengan terjadinya berbagai pemberontakan di daerah-daerah. Maka pidatonya tahun 1957 Presiden Soekarno menyatakan gagasannya untuk menerapkan Sistem Demokrasi Terpimpin.

Setelah secara resmi Demokrasi Terpimpin diterapkan di Indonesia, seperti telah diuraikan Dwimuka bahwa Soekarno kemudian membentuk DPR-GR. Presiden Soekarno menghendaki agar dalam dewan tersebut duduk orang-orang PKI, yang selalu memberikan dukungan terhadap semua konsepnya. Walaupun Soekarno tahu banyak partai yang tidak menyetujui gagasannya. Mengenai ini Presiden mengatakan :

“Yah saya tahu, terhadap PKI, ada beberapa saudara-saudara atau pihak yang berkeberatan apakah kita dapat terus menerus mengabaikan satu golongan yang di dalam pemilu mempunyai suara enam juta dan telah mengorbankan berjuta simpatisannya demi kemerdekaan bangsa ini” (Soekarno, 1957: 11).

Dengan sepiantas saja dapat kita tafsirkan bagaimana kedudukan PKI di mata pimpinan Pemerintah itu. Tetapi itu juga dianggap wajar karena PKI juga diakui sebagai Salah satu partai yang resmi dan diperkenankan di Indonesia. Hal ini memang wajar dan tidak wajarnya, yang tidak wajarnya yaitu, mengapa PKI diperkenankan hidup, yang secara jelas bertentangan dengan Pancasila.

Bagi PKI keadaan tersebut sangat menguntungkan, sebab PKI sangat pintar membaca situasi. PKI tahu presiden selalu melindungi dan mendukung partainya, hal itu pun sangat melebarkan jalan PKI dalam menempatkan pengaruhnya di berbagai kehidupan ber-negara.

Tiap-tiap jabatan dan instansi pemerintah di infiltrasi oleh kader-kader PKI yang sudah dilatih, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri (Uni Soviet dan Cina), dari Jawa terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta, di sebar kader-kader inti di seluruh pelosok. Dalam menjalankan gerakannya Aidit lebih beruntung dari MUSO, karena setiap gerakannya di legalisir oleh Presiden Soekarno, dengan menempatkan orang-orang PKI di berbagai instansi pemerintah

berdasarkan konsepsi nasakom (A.Z. Abidin; Baharudin Lopa, 1982 : 62).

Pada mulanya Aidit mengikuti taktik yang telah digunakan Mao Tse tung dengan kom-binasi taktik koeksistensi secara damai Uni Soviet. Kita ketahui Mao sebelum menggulingkan pemerintah nasional Tjiang Kai Shek, menggunakan petani di desa-desa yang masih sebagian besar buta huruf, dengan janji dibagi-kan tanah bagi petani. Janji itu menjalar kepada setiap desa dengan cepat sekali merangsang para petani kecil di pulau Jawa terutama yang padat penduduknya. Tetapi ke dalam, Aidit menggunakan taktik koeksistensi secara damai dengan partai-partai yang ada dan kepada Soekarno, yang hendak memaksakan kabinet berkaki empat dan nasakomisasi semua instansi pemerintah sipil dan militer.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidatonya memper-tegas konsepnya yang berjudul penemuan kembali revolusi kita. Pidato tersebut kemudian diserahkan kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara. Yang memimpin Panitia tersebut adalah Aidit ketua CC PKI. Kesempatan ini dimanfaatkan olehnya untuk memasukan program-program PKI ke dalam GBHN yang diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia (manipol). Dengan pintar Aidit berhasil mensistemasi Manipol berdasarkan Tesis PKI, Masyarakat Indonesia (MIRI) yang dirumuskan pada tahun 1957, dua tahun sebelum Presiden Soekarno mengandalkan pi-dato di atas. Dengan kata lain PKI berhasil memasukkan program-program ke dalam GBHN.

Dengan dapat memasukan MIRI ke dalam GBHN, maka KIRI telah disatukan dengan Manipol, sedangkan Manipol sudah ditetapkan sebagai GBHN, artinya kepentingan PKI sudah tertampung dalam GBHN dan oleh karena itu, bahwa GBHN sudah mencakup seluruh negara, maka berarti program PKI sudah menjadi kepentingan nasional.

Semakin lengkap pengaruh kekuatan PKI setelah terbentuknya Front Nasional di mana di dalamnya terdapat tokoh-tokoh PKI. Front itu sendiri dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat secara demokratis, tetapi dalam kenyataan jauh lebih menyimpang dari yang dikatakan demokratis. Hal itu karena banyak pengaruh PKI yang ada dalam lembaga itu. Selain langkah-langkah tersebut, PKI juga berusaha

menginfiltrasikan dirinya ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata. Semua itu cukup berhasil dilakukan PKI kecuali dalam TNI Angkatan Darat.

Dengan perkembangan tersebut secara politis Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat perlindungan dari Presiden, maka semakin kuatlah PKI, dan mereka dirasa telah siap dengan tindakan menghadapi pihak lain yang dianggap menjadi penghalang segala programnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Akibat gagalnya konstituante untuk membentuk Undang-undang Dasar yang baru, Serta rentetan peristiwa politik lainnya, maka sampailah pada inti klimaks pada bulan Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959, isinya mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Sedangkan demokrasi yang dianut adalah “Demokrasi Terpimpin” dengan mengambil terminologi Sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sedang terpimpin menurut Presiden Sukarno dengan pimpinan pribadinya selaku Pemimpin Besar Revolusi yang cenderung ke arah otoriter.

Sistem politik terpimpin juga mengarah kepada ekonomi terpimpin yang melahirkan sistem “etatisme”. Sistem ekonomi terpusat menempatkan pemerintah pada pemilik lisensi berbagai kebijakan ekonomi. Ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang memberikan peluang ke arah terciptanya penyelewengan dan korupsi.

Krisis Irian Barat serta dukungan Inggris terhadap pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, menimbulkan kecurigaan Indonesia terhadap negara-negara yang dianggap Imperialis sehingga Indonesia mengadakan ikatan yang erat dengan negara-negara yang anti imperialisme.

Negara-negara yang anti imperialisme diberi nama New Emerging Force (kekuatan yang baru muncul) disingkat negara-negara Nefos, yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, RRC dan Korea Utara. Dengan demikian terjadilah proses anti imperialisme Jakarta-Pnompenh-Hanoy-Peking-Pyongyang. Berarti Indonesia meninggalkan politik bebas aktif terutama dengan condongnya Indonesia ke arah negara-negara yang berhaluan komunis.

Rekomendasi

Agar tidak terulang lagi penyimpangan-penyimpangan dalam sistem pemerintahan, hendaklah sistem pemerintahan kita itu sistem pemerintahan yang berpijak pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sistem Demokrasi yang dilaksanakan dalam pemerintahan hendaknya pula sistem demokrasi yang mampu meningkatkan keman-tapan stabilitas nasional, agar seluruh warga masyarakat terayomi dari segala hal-hal yang tidak diinginkan.

Meniru dan menyerap sistem pemerintahan negara lain bukan jaminan untuk terwujudnya stabilitas nasional yang mantap, karena kita sadar bahwa pandangan hidup dan kepribadian bangsa kita jauh berbeda dengan bangsa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Luar Negeri (1945-1970), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Departemen Luar Negeri, Jakarta.
- Disbintal TNI-AD. 1990. *Sejarah TNI-AD Periode 1945-1973*. Jakarta.
- Kansil CST, 1982. *Pancasila dan UUD 1945 Dasar dan Falsafah Negara*, PT Padma Paramita, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo. 1984. *Ratu Adil*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Suli Sulaeman. 1976. *Dasar-dasar Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta.
- Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia dan Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia.

